

ANALISIS RESOLUSI KONFLIK PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN BLORA

Figar Ilham Bawazir, 14020222136036

Program Studi Administrasi Publik K.Rembang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Diponegoro Semarang

figarilhambawazir@students.undip.ac.id , 081291797896

Abstrak

Resolusi konflik penting untuk memahami penyebab dan penyelesaian konflik, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2012. Konflik sosial dapat terjadi akibat perbedaan kepentingan dan perebutan sumber daya terbatas. Penelitian ini menganalisis resolusi konflik antara Ormas Pemuda Pancasila dan GRIB JAYA di Kabupaten Blora dengan menggunakan teori kekerasan Johan Galtung dan teori konflik realistik Muzafer Sherif. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara dengan kedua ormas dan KESBANGPOL Kabupaten Blora. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik dipicu oleh kecemburuan dalam penerbitan SKT dan perselisihan pengelolaan sumber daya minyak bumi, yang berujung pada bentrokan. Penyelesaian konflik dilakukan melalui mediasi FORKOPIMDA Kabupaten Blora, namun diperlukan peran pemerintah yang lebih responsif serta penanganan konflik yang berkelanjutan agar konflik serupa tidak terulang.

Kata kunci: Resolusi konflik, konflik, ormas, pemerintah

1. PENDAHULUAN

Resolusi konflik di Indonesia masih menjadi masalah yang kompleks dan perlu ditangani secara serius karena berbagai faktor mulai dari historis, sosial, budaya, serta ketimpangan ekonomi dan politik yang masih terus berlanjut. Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat beragam dari segi suku, agama, ras, dan golongan (SARA), sering kali menghadapi gesekan antar kelompok yang bisa

berujung pada konflik horizontal maupun vertikal (Dharmawan, 2006).

Menyadari kompleksitas dan besarnya dampak konflik sosial, pemerintah Indonesia merespons dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Undang-undang ini menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya negara memiliki kerangka hukum resmi dan menyeluruh dalam menangani konflik sosial. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa

DATA KONFLIK

Provinsi	Jumlah Peristiwa Konflik	Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya
Papua Selatan	1	0
Papua Barat Daya	1	0
Papua Barat	1	0
Papua Tengah	1	0
Papua	1	0
Nusa Tenggara Barat	5	0
Nusa Tenggara	4	0
Bali	1	0
Maluku Utara	8	0
Sulawesi Utara	5	0
Sulawesi Tengah	4	0
Sulawesi Selatan	16	17
Sulawesi Barat	1	0
Gorontalo	1	0
Kalimantan Timur	1	0
Kalimantan Utara	1	0
Kalimantan	1	0
Kalimantan Barat	1	0
Kalimantan Timur	25	26
D.I.Yogyakarta	4	0
Jawa Tengah	34	35
DKI Jakarta	38	39
Banten	10	29
Sumatera Utara	10	0
Kep. Bangka	4	0
Kepulauan Riau	2	0
Jambi	1	0
Bengkulu	1	0
Riau	1	0
Sumatera Barat	1	0
Sumatera Utara	20	21
Sumatera Barat	1	0
Aceh	1	0

tentunya memiliki karakter, sifat budaya, dan kepentingan-kepentingan dari tiap individu atau kelompok yang berbeda. sehingga dari perbedaan ini yang biasanya menimbulkan sebuah konflik (Suryahartati et al., 2022).

Konflik antar ormas ini mengakibatkan terjadinya kerusuhan dan bentrokan yang terjadi antara ormas Pemuda Pancasila dan GRIB JAYA yang ada di Kabupaten Blora. Konflik yang ditimbulkan dari bentrokan antar ormas ini mengakibatkan beberapa

kericuhan yang semakin memanas. Permasalahan ini bermula ketika sekelompok anggota Pemuda Pancasila Kabupaten Blora yang menggeruduk markas GRIB JAYA Kabupaten Blora. Hal ini mengakibatkan kericuhan di lokasi sekitar dan pada akhirnya kericuhan tersebut sempat diredam oleh aparat kepolisian dan TNI yang langsung berjaga-jaga di lokasi sekitar (KOMPAS.com).

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, yakni serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh penulis yang berkenaan pada metode pengumpulan data yang terfokus pada observasi, wawancara secara langsung, dengan cara menanyakan dan menjawab pertanyaan, mencatat dan kemudian mengelola data yang diperlukan.

Pendekatan deskriptif kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam suatu fenomena, peristiwa, atau kondisi sosial yang ada di dunia nyata, tanpa melakukan manipulasi terhadap variabelnya. Metode ini mengandalkan data non-numerik seperti wawancara, observasi, dan dokumen untuk menghasilkan uraian yang kaya makna.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Johan Galtung berpandangan bahwa konflik merupakan penyebab dari

terjadinya kekerasan dan juga yang menjadi potensi munculnya kekerasan itu, sehingga perang atau tindakan kekerasan menjadi dampak dari adanya konflik. Kemudian Galtung membagi kekerasan menjadi tiga macam, yaitu kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural. Dari ketiga macam kekerasan tersebut memiliki dua jenis dimensi, yaitu dimensi langsung (fisik) dan dimensi tidak langsung (non-fisik) (Saragih et al., 2022).

konflik sosial pada dasarnya memiliki akar yang nyata, yaitu adanya perebutan kepentingan terhadap sumber daya yang terbatas, bukan semata karena perbedaan identitas sosial atau budaya. Lebih jauh, (Sherif et al., 1961) menegaskan bahwa konflik antar kelompok dapat direduksi apabila pihak-pihak yang berkonflik diarahkan pada pencapaian *superordinate goals*, yakni tujuan bersama yang hanya bisa dicapai apabila kedua kelompok bekerja sama.

1. Latar Belakang Terjadinya Konflik Antara Pemuda Pancasila Dan GRIB JAYA Kabupaten Blora.

Konflik antar ormas pemuda Pancasila dan GRIB JAYA yang terjadi di Kabupaten Blora merupakan sebuah konflik yang sangat kompleks dan penting sekali untuk diselesaikan. Hal ini mengingat dampak yang muncul akibat konflik tersebut terhadap kepentingan publik. Dalam suatu bentuk

penyelesaian konflik tentunya memerlukan identifikasi mendalam agar dapat menghasilkan penyelesaian bukan hanya dalam jangka pendek namun juga harus mempertimbangkan jangka panjangnya. Konflik yang terjadi ini bermula ketika adanya penggerudukan markas GRIB Kabupaten Blora oleh anggota Pemuda Pancasila Kabupaten Blora sebagai aksi penolakan atas kehadiran ormas yang baru terbentuk di Kabupaten Blora. Adanya konflik yang terjadi tersebut diawali dengan berbagai faktor yang menjadi pemicunya.

Awal mula sebuah gerakan yang dilakukan Pemuda Pancasila Kabupaten Blora ini merupakan bentuk kesalahan komunikasi yang tidak dapat disampaikan dengan baik atas hadirnya ormas GRIB JAYA yang baru di Kabupaten Blora. Mereka menganggap bahwa Ormas baru yang belum melakukan kegiatan sosial di tengah masyarakat belum layak dan mereka menganggap belum memiliki izin resmi. Sehingga hadirnya GRIB di Blora ini masih dipertanyakan legalitasnya. Atas tuduhan-tuduhan yang tidak dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak terkait akhirnya munculah miskomunikasi yang terjadi.

Aksi penggerudukan tersebut menimbulkan rasa kemarahan dari

anggota GRIB JAYA se- Jawa Tengah, kemudian terjadilah apel pasukan GRIB JAYA se-Jawa Tengah di Alun-Alun Kabupaten Blora dengan maksud ingin melaporkan pihak pemuda Pancasila yang dianggap melakukan pencemaran nama baik. Setelah itu terdapat gesekan dari kedua belah pihak di 2 titik yang berbeda yaitu di perempatan karangjati Blora dan di kecamatan Kunduran. Dari adanya bentrokan tersebut mengakibatkan korban luka-luka dari kedua belah pihak tersebut. Akibat dari pecahnya konflik ini menjadikan trauma bagi Masyarakat sekitar kejadian konflik. Hal ini juga mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban umum di masyarakat.

Kekerasan langsung dalam konflik ini sangatlah jelas terlihat baik berupa fisik dan non fisik. Kekerasan langsung berupa Tindakan fisik yang ada dalam konflik ini Adalah pecahnya konflik atau bentrokan yang mengakibatkan banyak korban luka-luka. Sebelum terjadinya bentrok tersebut juga sempat kata-kata yang kurang pantas yang disampaikan oleh ormas pemuda Pancasila saat mendatangi markas GRIB JAYA kabupaten Blora tersebut, hal ini juga merupakan bentuk Tindakan kekerasan langsung non fisik. Selain itu juga terdapat kekerasan struktural yang mana konflik ini juga imbas dari adanya

mis komunikasi yang telah terjadi sebelumnya sehingga adanya rasa cemburu, dendam yang menjadikan adanya rencana penolakan kehadiran ormas GRIB JAYA di Kabupaten blora.

2. Faktor - Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Antara Ormas Pemuda Pancasila Dan GRIB JAYA Kabupaten Blora.

Faktor yang menjadi salah satu alasan adanya aksi penggerudukan tersebut juga dikarenakan terdapat perbedaan pandangan tentang pengelolaan sumberdaya alam berupa pemanfaatan hasil minyak bumi oleh Masyarakat lokal (BUMDES). Terdapat sumur minyak yang selama ini mempekerjakan anggota -anggota Ormas Pemuda Pancasila ini sebagai tenaga keamanan, malah dicegat dijalan oleh ormas grib dengan dalih membawa bahan minyak illegal dan tidak memiliki izin. Sehingga Tindakan tersebut juga menimbulkan ketersinggungan serta perbedaan arah pandang dari kedua ormas yang ada di kabupaten blora tersebut.

Selain itu Faktor kecemburuan atas jangka waktu penerbitan SKT oleh KESBANGPOL Kabupaten blora yang dianggap terbang pilih menjadi alasan utama pemuda Pancasila melakukan aksi protes tersebut. KESABNGPOL selaku pihak yang melakukan

pencatatan terhadap seluruh ormas yang ada di kabupaten blora dianggap terlalu dini dalam hal penerbitan SKT GRIB JAYA. Jangka waktu dalam penerbitan tersebut sangat berbeda jauh dengan lama penerbitan SKT Pemuda Pancasila saat itu. Namun pihak KESBANGPOL Blora telah menegaskan bahwa memang terdapat perbedaan aturan pada saat penerbitan SKT Pemuda Pancasila saat dulu dengan Penerbitan SKT GRIB JAYA sekarang, selain itu faktor lama pengurusan SKT Pemuda Pancasila juga dikarenakan adanya dualisme kepemimpinan.

Dengan adanya faktor tersebut maka hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memicu konflik ini sebenarnya dikarenakan pola komunikasi yang kurang baik. Hal ini tentunya akan menghadirkan misskomunikasi dan kesalahpahaman yang menimbulkan suatu konflik.

Adanya keinginan untuk mendominasi sebagai ormas yang sama-sama memiliki orientasi target, serta kegiatan yang hampir sama menjadikan konflik ini semakin kompleks. Banyaknya anggota ormas pemuda Pancasila yang berpindah dan masuk ke ormas GRIB termasuk ketua DPC GRIB JAYA yang dulu juga Adalah mantan Bendahara Pemuda Pancasila Blora akhirnya menimbulkan rasa dendam dan

kemarahan dari ormas pemuda Pancasila.

Dari semua faktor yang menjadikan konflik ini bisa sampai muncul, terdapat beberapa alasan penting yang menjadi dasar bahwa konflik ini bermula. Faktor pola komunikasi yang kurang baik menjadi salah satu faktor utama dari sekian banyaknya faktor yang

4. KESIMPULAN

Konflik antara Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Blora dan GRIB JAYA Kabupaten Blora merupakan konflik sosial yang bersifat kompleks. Konflik ini tidak hanya ditandai oleh kekerasan langsung, baik fisik maupun non-fisik, tetapi juga dipengaruhi oleh kekerasan kultural yang bersumber dari perbedaan karakter individu, budaya organisasi, gaya komunikasi, serta pola kepemimpinan masing-masing ormas.

Selain itu, adanya persaingan kepentingan, khususnya dalam perebutan sumber daya terbatas seperti bisnis keamanan, kegiatan sosial dengan sasaran yang sama, serta perpindahan anggota, memperkuat eskalasi konflik yang terjadi. Faktor kesalahpahaman dan lemahnya pola komunikasi menjadi pemicu utama konflik, terutama akibat informasi yang tidak terverifikasi dan kurangnya mekanisme klarifikasi antar pihak. Intensitas persaingan yang tinggi,

menimbulkan konflik ini. Komunikasi yang cenderung mengedepankan rasa egoisme masing-masing pihak menimbulkan beragam stereotip negatif antar kedua ormas tersebut. Pola persaingan dari kedua belah pihak serta munculnya berbagai gesekan-gesekan kecil menjadikan konflik ini menjadi cukup kompleks dan rumit.

ditambah dengan kedekatan wilayah aktivitas dan lokasi markas, semakin meningkatkan potensi gesekan antar kelompok.

Oleh karena itu, konflik ini menunjukkan bahwa lemahnya komunikasi, persaingan kepentingan, dan tidak adanya ruang dialog yang efektif dapat mendorong organisasi kemasyarakatan menuju tindakan represif dan kekerasan terbuka. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam memperkuat sistem deteksi dini konflik, membangun forum komunikasi lintas ormas, serta mendorong budaya dialog, klarifikasi, dan kerja sama sosial yang konstruktif. Upaya-upaya tersebut menjadi kunci dalam mencegah konflik serupa di masa mendatang serta menciptakan stabilitas dan kohesi sosial yang berkelanjutan di tingkat lokal.

5. DAFTAR PUSTAKA

Agil Prasetyo, D., Suprayoga, A., & Hani'ah. (2018). 22436-45448-1-Sm.

- Geodesi Undip*, 7, 314–324.
- Agung, I. (2011). Konflik Antar Kelompok: Perspektif Psikologi Sosial. *Jurnal Psikologi Sosial*, 10(2), 10. <http://ssrn.com/abstract=2552360>
- Ahmad, & Muslimah. (2021). Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif. *Proceedings*, 1(1), 173–186.
- Amer, N. (2017). ANALISIS PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM Analysis. *Jurnal Legalitas Fakultas Hukum Universitas Gorontalo*, 15(1), 1–15.
- Andarie, Y. (2019). Bekerja Paruh Waktu Sebagai Gaya Hidup Modern Mahasiswa. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Ariyanto, K. (2014). Analyzing the Conflict between Football Organizations in Indonesia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 115(Icies 2013), 430–435. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.02.450>
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *metode penelitian kualitatif*.
- Ayu, R. S., Hasanah, R. L., Febryan, R., Azahra, S., & Kusuma, A. J. (2024). Analisis Rasa Nasionalisme Masyarakat Aceh Pasca Konflik Gerakan Aceh Merdeka. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 2(2), 320–328. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jiksp/article/view/1868>
- Dewi, A., Hidayat, R., Widhagdha, M. F., & Purwanto, W. (2020). Dinamika Komunikasi Dalam Resolusi Konflik Sosial. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 33. <https://doi.org/10.31258/jkp.11.1.p.33-38>
- Dharmawan, A. H. (2006). Konflik-Sosial dan Resolusi Konflik : Analisis Sosio-Budaya (Dengan Fokus Perhatian Kalimantan Barat) 1. *Seminar PERAGI Pontianak*, 1–14. <https://www.academia.edu/download/31194465/Konflik-Sosial-dan-Resolusi-Konflik-Analisis-Sosio-Budaya-Dengan-Fokus-Perhatian-Kalimantan-Barat.pdf>
- Dwi Eriyanti, L. (2017). Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(1). <https://doi.org/10.18196/hi.61102>
- FAMI, N. (2018). *ANALISIS PEMBERDAYAAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL (Studi Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung)*.

1–23.

- Fitri, F. (2025). Literatur Review: Analisis Resolusi Konflik Di Indonesia. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 6(2), 200–204. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v6i2.54586>
- Hasiholan, W. Y. (2016). *PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR ORGANISASI GENG MOTOR OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG*. 1–23.
- Immanuel Citra Senjaya. (2025). *Kapolda : Konflik sosial di Jateng dipicu gesekan antarormas*. ANTARA. <https://jateng.antaranews.com/berita/592865/kapolda--konflik-sosial-di-jateng-dipicu-gesekan-antarormas>
- Indrawan, J., & Putri, A. T. (2022). Analisis Konflik Ambon Menggunakan Penahapan Konflik Simon Fisher. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(1), 12. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i1.36608>
- Iqbal Asnawi, M., Fitriani, R., Syafrina Tala, W., Aikel Primsa Tarigan, J., Maulana Daffa, T., & Habibi, W. (2024). *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*. 5(7). <https://doi.org/10.56128/jkih.v4i3.402>
- Jamil, A. N. (2025). *Ormas Pemuda Pancasila Geruduk Markas GRIB di Blora*. DetikJateng.
- Keban, Y. T. (2004). Enam dimensi strategis administrasi publik: konsep, teori dan isu. *Gava Media*.
- Khaswara, F., & Hambali, R. Y. A. (2021). Conflict Theory According to Johan Galtung. *Gunung Djati Conference Series*, 4, 650–661.
- Komaling, C. P., Sofia, P., & Kumayas, N. (2018). Peranan pemerintah kecamatan dalam menangani konflik antar-kampung di Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow. *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1).
- Kondo, H., Tsuda, K., & Kino, Y. (2021). Analysis of recognition of inter-organizational conflict and actions to address it using dependency expressions. *Procedia Computer Science*, 192, 1713–1719. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.08.176>
- Kurniawan, D. (2022). *ANALISIS DAN RESOLUSI KONFLIK ANTAR ORMAS DI TANAH ABANG JAKARTA PUSAT (Studi Kasus: Konflik Antara Ormas Sikumbang dan FKPT)* (Issue 11151110000051).
- Latinapa, M, M., Arsyad, A., & Suling, A. (2021). Pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah,

- kemampuan komunikasi interpersonal guru, dan komitmen kerja guru terhadap pengendalian konflik di sdn kecamatan ratolindo kabupaten tojo una-una. *Jurnal Normalita*, 9(3), 386–401. <http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/JN/article/view/983>
- Mouwn Erland. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Issue March).
- Nanang, W. (2016). Resolusi Konflik Berbasis Budaya Oleh Masyarakat Kabupaten Poso. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(1), 1–73.
- Nisa, J. (2015). RESOLUSI KONFLIK DALAM PERSPEKTIF KOMUNIKASI * Jakiatin Nisa 1 Permalink: <https://www.academia.edu/15117008> . *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2(1), 24.
- Nunkoo, D. K., & Sungkur, R. K. (2021). Team conflict dynamics & conflict management: derivation of a model for software organisations to enhance team performance and software quality. *Global Transitions Proceedings*, 2(2), 545–552. <https://doi.org/10.1016/j.gltp.2021.08.007>
- Nuradhawati, R. (2022). Pemberdayaan Ormas Pemuda Pancasila Dalam Upaya Menjaga Kekondusifan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Kecamatan Cinambo Kota Bandung. *Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma*, 3(2), 140–150. <https://doi.org/10.26874/jakw.v3i2.260>
- Pasolong. (2019). Teori Administrasi Publik. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksana/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Pradipta, K. (2025). Apa Itu Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya atau GRIB Jaya? TEMPO. <https://www.tempo.co/infografik/infografik/apa-itu-gerakan-rakyat-indonesia-bersatu-jaya-atau-grib-jaya--1354374>
- Pramono, W. I., & Munandar, A. I. (2020). Peran Undang-Undang Ormas Terhadap Penyelesaian Konflik Antar Ormas. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 12(1), 52. <https://doi.org/10.30997/jill.v12i1.2296>
- Priyono, D. P., & Nilamsari, W. (2021). Penyalahgunaan Hak Dan Wewenang Organisasi Masyarakat Di Kelurahan Kedaung, Tangerang Selatan, Banten. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 5(2), 72–88. <https://doi.org/10.38043/jids.v5i2.31>

- Puspasari Setyaningrum. (2025). *Kronologi Bentrokan Anggota Ormas Pemuda Pancasila dan GRIB di Blora*. Kompas.Com.
- Rahman, A., Wasistiono, S., Riyani, O., & Tahir, I. (2023). *Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. 7(2), 1461–1471. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1492>
- Ramadhani, A. I., Putri, D., Kusuma, H. P., Risqi, M., Putri, T. N., & Alimin, M. '. (2025). Teori Manajemen Konflik. *Pusat Publikasi Ilmu Manajemen*, 1, 116–124. <https://doi.org/10.59603/ppiman.v3i1.635>
- Ramly, A. (2020). KEKUASAAN KEPALA DESA (Studi Kasus di Desa Selasi Kecamatan Ambalau). *Hipotesa*, 14(1), 33–51.
- Rendy Adiwilaga, Mustabsyrotul Ummah Mustofa, & Kansah Eka Permana. (2023). Analisis Swot Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Dalam Penanganan Konflik Horizontal Organisasi Masyarakat Di Kabupaten Bandung. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 249–270. <https://doi.org/10.25157/moderat.v9i2.2868>

- Rinawati, R., Sartima, T., Fitri, A., & Saputra, N. (2023). Peran NGO (Non-Governmental Organization) dalam Pengimplementasian Urban Farming Sebagai Strategi Adaptasi Di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. *UNES Law Review*, 6(2), 6544–6555. <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1515%0Ahttps://www.review-unes.com/index.php/law/article/download/1515/1224>
- Saragih, D. E., Nulhaqim, S. A., & Fedryansyah, M. (2022). Analisis Segitiga Spk Pada Kekerasan Langsung Antar Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Forum Betawi Rempug (Fbr) Dan Pemuda Pancasila (Pp). *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(2), 134. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i2.40000>
- Setyadi, A. (2015). Analisis Komunikasi Interpersonal Pustakawan Dalam Citra Layanan Sirkulasi Di Upt Perpustakaan Universitas Diponegoro Semarang. *Ilmu Perpustakaan*, 4(2), 24–31. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/9513>
- Shabani, G., Behluli, A., & Qerimi, F. (2022). The Impact of Conflict Management Styles on

- Organizational Performance: A Comparative Analysis. *Emerging Science Journal*, 6(4), 758–775. <https://doi.org/10.28991/ESJ-2022-06-04-07>
- Shehu-Usman, M., Uzochukwu, I. U., Nasamu, G., & Abubakar, H. L. (2024). Conflict Management Strategies and Organisational Performance: A Study of Federal Roads Maintenance Agency in Abuja, Nigeria. *Global Journal of Human Resource Management*, 12(1), 49–67. <https://doi.org/10.37745/gjhrm.2013/vol12n14967>
- Sherif, M., Harvey, O. J., White, B. J., Hood, W. R., & Sherif, C. W. (1961). Intergroup conflict and cooperation: The Robbers Cave experiment. *American Sociological Review*, 4(Stage 3), 229.
- Sholikin, F. N., Jamil, M., & Artikel, G. (2024). Ketimpangan dan Komunikasi sebagai Penyebab Terjadinya Konflik pada Masyarakat dan Pemerintah Terhadap Dampak Transportasi Angkutan Pertambangan Batu Bara di Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal Of Community Development*, 3(3). <https://journal.nabest.id/index.php/jcd/index>
- Sintaresmi, P., Muchsin, S., & Ahmadi, R. (2022). IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL (Studi Kasus Pencegahan Konflik Sosial Di Kota Probolinggo). *Jurnal Academia Praja*, 5(1), 56–72.
- Suryahartati, D., Windarto, W., Pebrianto, D. Y., & Yusuf, M. (2022). Analisis Potensi Konflik Dan Penanganan Konflik Pada Organisasi Kemasyarakatan Di Provinsi Jambi Berbasis Gender Equality and Social Inclusion (Gesi). *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(2), 15–26. <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i2.22586>
- Suryani, I. K. A. S. A. A. S. L. D. L. P. (2024). Sanksi Hukum Bagi Pelaku Aksi Premanisme yang Dilakukan Ormas Terhadap Petugas Polisi Pamong Praja di Denpasar. 6(1), 33–38.
- Tualeka, M. W. N. (2017). Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern. *Al-Hikmah : Jurnal Studi Agama-Agama*, 3(1), 32–48. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Ah/article/view/409>
- Untari, I. (2019). metode penelitian kuantitatif. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng->

8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=
y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.reg
sciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://w
ww.researchgate.net/publication/305
320484_SISTEM_PEMBETUNGA
N_TERPUSAT_STRATEGI_MELE
STARI

Widyaningsih, W. (2016). *Program Pendidikan Layanan Khusus (PLK) Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)*. 31–32.